

BAB VI

SARAN

1. Dinas Kesehatan Propinsi Seksi Farkalkes
 - Sebaiknya diadakan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan, NAPZA dan bahaya Napza bagi kesehatan secara berkala di sekolah-sekolah, lingkungan perumahan, pedesaan, dan lain-lain.
 - Menyadarkan masyarakat tentang pentingnya koordinasi masyarakat dalam pelaporan beredarnya obat-obatan dan kosmetika palsu dimasyarakat.
 - Sebaiknya mengadakan penyuluhan mengenai makanan dan minuman yang mengandung bahan tambahan berbahaya sehingga masyarakat lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman.
 - Sebaiknya mengadakan penyuluhan mengenai Obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang berbahaya bagi kesehatan.
2. Gudang Obat Probolinggo
 - Berdasarkan hasil kunjungan diketahui gudang obat belum memiliki penyejuk udara (AC), sebaiknya suhu dan kelembaban gudang disesuaikan dengan persyaratan penyimpanan obat agar stabilitas obat tetap terjaga.
 - Sistem pengendalian persediaan sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi sehingga dapat mempermudah pengendalian stok obat.
 - Dalam penyusunan dos obat sebaiknya memperhatikan batas maksimum penumpukan dan memberi jarak dengan dinding sehingga mudah dibersihkan dan tidak lembab.

3. Puskesmas Ketapang Probolinggo

- Sebaiknya dilakukan penambahan tenaga apoteker dan asisten apoteker untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara optimal khususnya pada malam hari.
- Sebaiknya disediakan tempat untuk penyerahan obat dan KIE
- Sebaiknya tempat penyimpanan obat, peracikan dan penyerahan obat diberikan tempat secara terpisah

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, 2005. *Pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. [tahun 2008]. Pedoman Penilaian Tenaga Kerja Teladan di Puskesmas Tahun 2008. (Online). http://www.depkes.go.id/downloads/pedoman_penilaian.pdf. [14 Juli 2008].
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik, 2006, *Pedoman Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas*. Jakarta.
- Direktorat Jendral Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 2004 *Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas*. Jakarta.
- Dinas Kesehatan. [no date]. Keppres RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Online). <http://www.pu.go.id/sekjen/ biro%20hukum/ keppres/ keppres80-03.htm>. [10 Juli 2008].
- Dinas Kesehatan. [no date]. Permenkes RI No. 168/Menkes/Per/II/2005 Tentang Prekursor Farmasi. Jakarta.
- Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur Sub Dinas Farmasi Makanan dan Minuman, 2006. *Modul Pedoman Pembinaan di Bidang Obat Tradisional*: Permenkes RI No.246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surabaya.
- Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. (Online). <http://www.desentralisasi.kesehatan.net/id/moduldhs/bahanbacaanumum/Bab%204%20Desentralisasi%20dan%20Perkembangan%20Peraturan%20Perundangan%20di%20sektor%20kesehatan.pdf>. [10 Juli 2008].

Pengurus Daerah IAI Jawa Timur, 2010. *Kumpulan Peraturan Perundangan Kefarmasian*, Surabaya.

Pusat Data dan Informasi Departemen Kesehatan RI [tahun 2005]. Gambaran Penyalagguna NAPZA Tahun 2001-2004. (Online). <http://bankdata.depkes.go.id/data%20intranet/NAPZA/Kajian%20Napza%202001-2004.pdf>. [14 Juli 2008].

LAMPIRAN A
DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO



LAMPIRAN B
GUDANG FARMASI KOTA PROBOLINGGO



LA



PU

KESMAS KETAPANG



LAMPIRAN C



APOTEK PUSKESMAS KETAPA

